

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1644 K/PDT/2020)

Oleh
**Efrilius Kantriburi, NIM: 1714101044 **
Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Dalam melakukan suatu peminangan dan sudah akan menikah, terjadi suatu pembatalan sepihak baik dari mempelai laki-laki dan atau dari mempelai perempuan. akibat pembatalan pernikahan tersebut pasti ada pihak yang dirugikan. Seperti misalnya salah satu contoh kasus yaitu, Akibat membatalkan pernikahan secara sepihak, calon pengantin pria berinisial AS di Banyumas, Jawa Tengah harus menjadi pesakitan di meja hijau. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan pernikahan (studi putusan mahkamah agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020). Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan- bahan hukum dianalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa hasil kesimpulan atau jawaban terhadap permasalahan/isu hukum yang sedang penulis teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020 adalah bermula adanya putusan pengadilan negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi jawa tengah nomor 423/PDT/2019/PT SMG dengan dasar pertimbangan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan pihak tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mana diatur pada pasal 1365 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (BW). Terdapat asas -asas dan norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas: Sepadang-sepinginang dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang sebagai dasar dalam Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020. Kedua, perbuatan melawan hukum berupa pembatalan pernikahan secara sepihak menimbulkan akibat hukum mengenai penggantian biaya kerugian baik materiil maupun im materiil kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak perempuan dan melalui putusan tersebut maka kesepakatan akan melakukan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020.

Kata Kunci : Pembatalan perjanjian, Pernikahan, Perbuatan Melawan Hukum

DUE TO THE LAW ON MARRIAGE CANCELLATION (STUDY OF THE JURISDICTION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1644 K/PDT/2020)

By

Efrilius Kantriburi, NIM:1714101044

Study Program Law Science

ABSTRACT

In making a proposal and are about to get married, there is a unilateral cancellation either from the groom and or from the bride. As a result of the annulment of the marriage, there must be a party who is harmed. For example, one case example is, as a result of unilaterally canceling the marriage, the groom with the initials AS in Banyumas, Central Java must be a prisoner at the court. The purpose of this study was to determine the basis for the consideration of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in deciding the case of annulment of marriage number 1644 K/Pdt/2020. To find out the legal consequences of marriage annulment (study of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1644 K/Pdt/2020). The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed to obtain final arguments in the form of conclusions or answers to legal problems/issues that the author is researching. The results of the study show that first, the basis for consideration of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in deciding the case of annulment of marriage number 1644 K/Pdt/2020 is that the decision of the Banyumas District Court Number 5/Pdt.G/2019/PN Bms and strengthened by the decision of the Central Java High Court Number 423/PDT/2019/PT SMG on the basis of legal considerations that the actions carried out by the defendant were against the law which is regulated in article 1365 of the Civil Code (BW). There are unwritten principles and norms in the Banyumas community: Sepadang-sepenginang and the jurisprudence of the Supreme Court Number 3191 K/Pdt/1984 dated December 12, 1985 which is the basis in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1644 K/Pdt/2020. Second, unlawful acts in the form of unilaterally canceling marriages have legal consequences regarding compensation for material and immaterial losses to the injured party, in this case the woman and through this decision, the agreement to carry out the marriage is considered to have never existed in accordance with the Supreme Court's decision. RI Number 1644 K/Pdt/2020.

Keywords: *Cancellation of agreement , Marriage, Unlawful Acts*